

BAB III

KIPRAH K.H. MAS MANSUR DALAM ORGANISASI POLITIK MASA PERGERAKAN NASIONAL

A. K. H. Mas Mansur dalam Organisasi Politik

Pada tahun 1915, setibanya dari pengembaraannya menuntut ilmu ke Hijaz dan Mesir, K.H. Mas Mansur menjumpai kota kelahirannya, Surabaya dalam suasana penuh hiruk pikuk oleh semangat kebangsaan kaum revolusioner. Bung Karno yang sempat indeks beberapa lama di rumah HOS Cokroaminoto di kawasan Paneleh melukiskan situasi Surabaya saat itu sebagai kota pelabuhan yang sibuk dan ribut, lebih menyerupai kota New York.¹ Di kota inilah HOS Cokroaminoto memimpin Central Sarikat Islam (CSI) yang terkenal dengan aksi-aksi radikalnya. Dalam suasana kota yang marak seperti itulah K.H. Mas Mansur memilih CSI sebagai lahan pengabdianya di bidang politik.²

Aktifitas K.H. Mas Mansur dalam pergerakan keagamaan diawali dengan membentuk kelompok diskusi *Taswirul Afkar* pada tahun 1916 di Surabaya bersama beberapa kiai muda, seperti K.H. Abdul Wahab Hasbullah dan K.H. Ahmad Dahlan Ahyat. Kelompok diskusi ini bertujuan ingin memajukan umat Islam, terutama kaum pemudanya dengan memancing mereka untuk menambah

¹Darul Aqsha, *K.H. Mas Mansur (1986-1946), Perjuangan dan Pemikiran*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 66.

²Amir Hamzah Wiryosukarto, *Kyai Haji Mas Mansur: Kumpulan Karangan Tersebar*, (Yogyakarta: Persatuan, 1992), hlm. x.

pengetahuan melalui perdebatan-perdebatan.³ Ilmu pengetahuan yang dimaksud ialah pengetahuan sosial keagamaan.

Tumbuh dari serangkaian diskusi itu kemudian memunculkan gagasan untuk mendirikan sebuah madrasah yang bertujuan menanamkan serta membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme anak didik yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Setelah berdiri, madrasah itu kemudian diberi nama *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air).⁴ Madrasah itu kemudian menunjuk K.H. Mas Mansur sebagai guru kepala.⁵ Ia dibantu oleh K.H. Mas Alwi, saudara sepupunya dan K.H. Ridwan, K.H. Wahab Hasbullah ditunjuk sebagai dewan guru dan K.H. Abdul Qahar sebagai direktornya.⁶ Adapun untuk penanaman nilai-nilai Islam dalam masyarakat luas dibentuklah *Ta'mirul Masjid* di bawah pimpinan HOS Cokroaminoto.⁷

Perkembangan kelompok diskusi dan madrasah ternyata mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, namun tidak bagi tokoh-tokohnya. Pada saat itu di antara tokoh-tokoh pendiri kelompok ini mulai terjadi perdebatan yang bersifat prinsipil. Salah satu perdebatan yang berakibat panjang ialah perdebatan antara K.H. Mas Mansur dan K.H. Wahab Hasbullah mengenai perlu tidaknya

³Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 27.

⁴Husain Haikal, "Meniti Jejas Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekular (Sekilas Biografi Mas Mansur 1896-1946)". *Jebat*, No.20, 1992, hlm. 79.

⁵Abdul Salam, "Sejarah dan Dinamika Sosial Fiqih Reformis dan Fiqih Tradisionalis di Indonesia", *Islamica*, Vol. 4, No. 1, September 2009, hlm. 55.

⁶Abdul Halim, *Sejarah Perjuangan K.H. Abdul Wahab Chasbullah*, (Bandung: Penerbitan Baru, 1970), hlm. 8-9.

⁷Darul Aqsha, *op.cit.*, hlm. 52.

tarekat pada mazhab. Perdebatan ini semakin menjadi-jadi setelah Surabaya kedatangan ulama-ulama pembaharu, di antaranya ialah K.H. Ahmad Dahlan, A.Hassan, Ahmad Sorkati, dan Umar Hubeisy.⁸ Mereka mengkritisi praktik peribadatan yang mengandung unsur-unsur *bid'ah*, *khurafat*, dan *taklid*⁹, serta menyerukan agar terus mengkaji dan mengamalkan isi sumber aslinya, yaitu Al Quran dan Sunnah.

Aktifitas ini mengundang reaksi keras dari kalangan ulama tradisional. Mereka menyebut K.H. Mas Mansur sebagai pengikut Wahabi dan bahkan menyebut K.H. Mas Mansur telah mendirikan agama baru yang mereka sebut “Agama Mansur”. Zamakhsari Dhofier menyimpulkan bahwa perdebatan ini merupakan awal pengelompokan umat Islam di Jawa ke dalam apa yang disebut “kelompok Islam tradisional” dan “kelompok Islam modernis”, sejak saat itu pulalah tampak gejala perpisahan antara K.H. Mas Mansur dan K.H. Wahab Hasbullah.¹⁰

Pada tahun 1920, bersama Fakih Hasyim dan Haji Ali yang sepaham, K.H. Mas Mansur membentuk *Ihya ussunnah*. Kelompok diskusi agama dan pendidikan ini rupanya menarik HOS Cokroaminoto. Kemudian K.H. Mas Mansur dan HOS Cokroaminoto mendirikan *Ta'mirul Gofilin*, sebuah forum

⁸*Ibid.*, hlm. 53. Lihat juga Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*, terj. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 246-247.

⁹*Bid'ah* berarti ajaran yang dibawa oleh perseorangan atau aliran tertentu ke dalam agama Islam yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Hadits. *Khurafat* berarti percaya pada tahayul, benda-benda keramat. *Taklid* berarti mengikuti ajaran ulama tanpa mengetahui sumber asli ajaran Islam.

¹⁰Zamakhsyari Dhofier, *op.cit.*, hlm. 27.

dakwah yang dikoordinir sendiri oleh HOS Cokroaminoto.¹¹ Melalui forum ini HOS Cokroaminoto kerap kali mengundang K.H. Ahmad Dahlan untuk memberikan pengajian di rumahnya di Surabaya. Tidak sedikit tokoh pergerakan yang menghadiri forum pengajian itu. Di sinilah Bung Karno dan Roeslan Abdulgani muda untuk pertama kalinya memperoleh penjelasan yang benar tentang Islam.¹²

Setahun kemudian, tepatnya tanggal 17 April 1921, *Ihya ussunnah* mengadakan suatu pertemuan yang dihadiri K.H. Ahmad Dahlan. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa *Ihya ussunnah* akan menjadi cabang Muhammadiyah. Beberapa hari kemudian, surat kabar *Oetoesan Hindia* terbitan 27 April 1921 melaporkan pendirian Muhammadiyah Cabang Surabaya.¹³ Dalam kesempatan itu K.H. Mas Mansur terpilih sebagai ketua umumnya, ini berarti Muhammadiyah Surabaya menjadi cabang kelima sejak Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912.

Pada 1922, K.H. Mas Mansur mengundurkan diri dari Madrasah *Nahdhatul Wathan*. Pengunduran ini karena ia berbeda pendapat dengan K.H. Wahab Hasbullah mengenai metode pengajaran dan persoalan *furu'iyah*. Ia kemudian berniat mendirikan sebuah madrasah baru, tetapi tidak mempunyai tanah untuk mendirikan bangunannya. Ia lalu melirik kandang kambing yang terletak di sebelah timur pondok pesantren ayahnya (K.H. Mas Ahmad Marzuki).

¹¹Darul Aqsha, *loc.cit.*

¹²Departemen Penerangan RI, *Makin Lama, Makin Tjinta; Muhammadiyah Setengah Abad 1912-1962*, (Jakarta, 1963), hlm. 13.

¹³Darul Aqsha, *op.cit.*, hlm. 54.

Maka ditemuilah ayahnya untuk menyatakan niatnya itu, dan sang ayah pun merestuinnya. Di atas tanah bekas kandang kambing itu dibangunlah sebuah bangunan yang terdiri dari beberapa ruang kelas, ruang kantor, dan kamar mandi. Pada hari Sabtu tanggal 3 Muharram 1340 H, atau 26 Agustus 1922 diresmikanlah sebuah madrasah yang diberi nama *Hizbul Wathan* (Tentara Tanah Air)¹⁴, meminjam nama organisasi kepanduan Muhammadiyah yang didirikan pada 1918, tetapi tidak lama kemudian nama itu digantinya dengan *Mufidah*. Madrasah ini bertujuan membentuk manusia muslim berahlak mulia dan percaya pada diri sendiri.¹⁵

K.H. Mas Mansur setiap harinya memiliki jadwal mengajar yang cukup padat. Ia mulai bekerja dari lepas subuh hingga jauh malam dan diselingi istirahat siang hari, karena ia mengajar di dua lembaga; yakni pesantren ayahnya dan madrasahnyanya, ditambah lagi dengan pengajian-pengajian yang diadakan atas inisiatifnya sendiri. Kegiatan yang terakhir ini biasanya dilakukan setelah sholat subuh, asar, dan isya, dengan menggunakan bahasa Jawa dialek Surabaya dan bahasa Melayu. Adapun jadwal pelajaran Madrasah dibagi menjadi dua, dari jam 8 hingga 12 pagi untuk siswa, dan dari jam 14 hingga 16 siang untuk siswi. Mata pelajaran yang diberikan adalah: nahwu, sharaf, tauhid, fikh, tarikh, tajwid, tahsinul khat, tafsir, hadist, dan akhlak, sedangkan pelajaran pengetahuan

¹⁴Husain Haikal, *op.cit.*, hlm. 80.

¹⁵Darul Aqsha, *loc.cit.*

umumnya ialah berhitung, menyanyi, menggambar, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris.¹⁶

Pada tahun 1924 K.H. Mas Mansur bertemu lagi dengan K.H. Abdul Wahab Hasbullah sebagai sesama anggota *Indonesische Studie Club*, sebuah kelompok studi yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Kelompok studi ini bertujuan untuk menggugah kaum terpelajar supaya mempunyai kesadaran akan kewajiban terhadap masyarakat dan memperdalam pengetahuannya tentang politik. Kagum akan kekompakan yang ada dalam kelompok studi ini, kedua kiai muda yang pernah berselisih pendapat itu bersepakat untuk mengadakan sebuah pertemuan yang bertujuan menggalang persatuan di kalangan muda umat Islam.¹⁷ Namun hasil pertemuan itu bertolak belakang dengan rencana semula. Hanya karena masalah *khilafiyah*, para pendukung kedua kiai muda itu justru membentuk organisasi sendiri-sendiri.

Dua tahun setelah itu K.H. Mas Mansur bersama HOS Cokroaminoto diutus mewakili *Mu'tamar Islami far'ul Hindish Sharkiyah* (MAIHS), Kongres Islam Sedunia Cabang Hindia Timur (yang semula bernama Kongres Al-Islam) untuk menghadiri Kongres Khilafah yang diprakarsai oleh Raja Ibn Saud di Mekkah pada 1 Juni 1926.¹⁸ Pada tanggal 2 Maret 1926 delegasi MAIHS yang dipimpin oleh K.H. Mas Mansur itu bertolak ke Mekah dari pelabuhan Tanjung

¹⁶*Ibid.*, hlm. 55.

¹⁷Mahali, "Kyai Haji Mas Mansur Perjuangan dan Pemikirannya", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN, 1985), hlm. 36.

¹⁸A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1984), hlm. 37-38.

Perak dengan menggunakan kapal *Rondo*,¹⁹ lalu singgah di pelabuhan Tanjung Priok. Beberapa pemuka Islam dan pejabat pemerintah memerlukan datang ke pelabuhan. R. A. Kern²⁰ dari *Kantoor voor Inlandsche Zaken* (Kantor Urusan Pribumi) misalnya, menyarankan kepada mereka berdua agar kalau perlu meminta bantuan Konsul Belanda di Jeddah dan bertemu dengan Van der Plaas yang dikenalnya sewaktu menjabat sebagai Kontrolir pemerintah di Surabaya.²¹ Adapun kongres di Mekkah itu dimaksudkan untuk berusaha meningkatkan derajat ulama Islam dan merumuskan tata tertib kongres berikutnya. Dalam kongres itu pula Raja Ibn Saud berpesan kepada para delegasi yang tanah airnya belum merdeka, supaya berupaya dengan gigih memperjuangkan kemerdekaannya.

Ironisnya, pengiriman delegasi ke Mekkah yang antara lain bertujuan untuk berpartisipasi dalam mewujudkan persatuan dunia Islam itu justru malah membawa dampak lain bagi persatuan umat Islam di Hindia Belanda. Dampak yang dimaksud ialah retaknya hubungan antara golongan ulama tradisional dan ulama pembaharu.²² Keretakan ini disebabkan oleh adanya ketidakpuasan kalangan ulama tradisional yang merasa aspirasinya tidak terwakili, baik dalam

¹⁹Amelz, *H.O.S Tjokroaminoto; Hidup dan Perjuangannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), hlm. 88.

²⁰R. A. Kern memegang jabatan Penasehat atau Komisaris Urusan Pribumi di *Het Kantoor voor Inlandsche Zaken* (Kantor Urusan Pribumi) tahun 1921-1922 dan 1924-1926. Lihat Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2005), hlm. 138.

²¹Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 79-80.

²²Abdul Salam, *op.cit.*, hlm. 56.

Kongres Al-Islam ke 4 dan ke 5 yang didominasi kalangan ulama pembaharu dengan hasil K.H. Mas Mansur dan HOS Cokroaminoto mewakili delegasi MAIHS ke Mekkah, oleh karena merasa dikecewakan, K.H. Wahab Hasbullah disertai ketiga pendukungnya memutuskan untuk ke luar dari keanggotaan Komite Khilafah. Kemudian pada tanggal 31 Januari 1926 ia memelopori terbentuknya Komite Hijaz yang kelak akan menjadi cikal bakal Nahdhatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasinya kepada Raja Ibn Saud.²³

Berangkatnya delegasi MAIHS ternyata tidak hanya menimbulkan keretakan hubungan antara golongan Islam tradisional dan modernis saja, namun keretakan ini juga menjalar ke golongan Islam modernis juga, khususnya antara Muhammadiyah dan Sarikat Islam, yang sejak 1921 menjadi Partai Sarikat Islam.²⁴ Kerenggangan ini terjadi karena perbedaan sikap politik, yaitu soal kooperatif dan nonkooperatif, dalam hal ini Deliar Noer beranggapan bahwa keretakan hubungan ini bermula karena adanya isu mengenai pribadi HOS Cokroaminoto yang mengecewakan ulama Muhammadiyah selama di Mekkah.²⁵

Dalam Kongres Al-Islam di Surabaya, 23 September 1926, K.H. Mas Mansur dan HOS Cokroaminoto menyampaikan laporan perjalanan mereka selama mengikuti kongres di Mekkah, sekaligus membantah isu sekitar pribadi HOS Cokroaminoto tersebut, selain itu kongres pun memutuskan untuk mendirikan Sekretariat MAIHS di Surabaya dengan penanggungjawab H. Agus

²³Saifudin Zuhri, *Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah: Bapak dan Pendiri NU*, (Yogyakarta: Pustaka Falaakhiyyah, 1983), hlm. 25.

²⁴Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 255-256.

²⁵Darul Aqsha, *op.cit.*, hlm. 57.

Salim, dengan adanya sekretariat, MAIHS bisa segera meluncurkan program-programnya. Atas saran K.H. Mas Mansur dan HOS Cokroaminoto berdasarkan observasi mereka selama berada di Mekkah, MAIHS pun membentuk dan mempropagandakan Haji Organisasi Hindia (HOH) yang diketuai K.H. Mas Mansur untuk memberikan penerangan kepada para calon jemaah haji Hindia Belanda.²⁶

Masalah kooperatif dan nonkooperatif merupakan satu hal yang memang mengganjal hubungan antara Partai Sarikat Islam dan Muhammadiyah. Sikap Muhammadiyah yang bertahan kooperatif itu membuat Partai Sarikat Islam gerah dan menjatuhkan disiplin partai kepada anggota Muhammadiyah melalui kongresnya di Pekalongan pada Januari 1927.²⁷ Ini berarti anggota Muhammadiyah yang merangkap sebagai anggota Partai Sarikat Islam dihadapkan pada dua pilihan: ke luar dari Partai Sarikat Islam atau tetap menjadi anggotanya tetapi harus ke luar dari Muhammadiyah.

Partai Sarikat Islam sejak meluncurkan politik hijrahnya yang non-kooperatif dan menjatuhkan disiplin partai kepada sejumlah anggotanya pada 1927 mengalami keretakan di dalam tubuhnya dan reputasinya sebagai partai besar kian merosot. Sejumlah tokoh keras yang menentang politik partainya mengundurkan diri dan membentuk partai sendiri. Keputusan ini kemudian membuat banyak pimpinan dan anggota Muhammadiyah meninggalkan Partai

²⁶A.K. Pringgodigdo, *op.cit.*, hlm. 37.

²⁷Djarnawi Hadikusumo, *Matahari-Matahari Muhammadiyah: Dari K.H.A. Dahlan sampai dengan K.H. Mas Mansur*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 55.

Sarikat Islam, tidak terkecuali K.H. Mas Mansur, dalam hal ini kemungkinan sikap K.H. Mas Mansur ke luar dari Partai karena dia beranggapan bahwa dengan sikap organisasi yang kooperatif akan memungkinkannya untuk lebih leluasa dan luwes berkiprah dalam memperjuangkan apa yang dicita-citakannya, sedangkan perwakilan dari tokoh keras yakni H. Agus Salim misalnya, mendirikan Barisan Penyardar, dan Dr. Sukiman dengan Partai Islam Indonesia-nya, namun sayang kedua partai ini tidak bisa menarik banyak anggota. Ketika Dr. Sukiman bertemu dengan K.H. Mas Mansur yang terkena disiplin partai terdapat persamaan ide untuk mempertahankan serta menaikan pamor partai Islam pertama di Hindia Belanda itu dengan kembali masuk menjadi anggotanya. Untuk itu K.H. Mas Mansur, Sukiman, Wali Al-Fattah, dan beberapa tokoh lainnya melayangkan sepucuk surat kepada pengurus besar partai, yang sejak 1929 namanya diganti Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII). Dalam surat itu dijelaskan bahwa mereka akan masuk PSII dengan mengajukan persyaratan agar partai tersebut:

1. Mau melepaskan azas hijrahnya, yakni sikap menarik diri atau menolak bekerja sama dengan pihak pemerintah, karena hijrah tidak bisa dijadikan sebagai azas perjuangan, tetapi sekedar taktik.
2. Hanya bergiat di bidang politik.
3. Segera mencabut disiplin partainya terhadap Muhammadiyah.²⁸

Namun PSII menolak semua persyaratan itu, kecuali soal disiplin partai terhadap Muhammadiyah, akan dibicarakan lagi. Atas penolakan itu, mereka kemudian memikirkan perlunya sebuah partai Islam baru yang kooperatif dan

²⁸*Ibid.*, hlm. 55-56.

sesuai dengan aspirasi mereka.²⁹ Aspirasi ini ternyata sejalan dengan aspirasi beberapa anggota *Islam Studie Club* yang menginginkan agar gerak kelompok diskusi itu diperluas meliputi bidang politik.

Tahun 1920-an merupakan tahun-tahun yang kritis bagi Islam di Hindia, sebagai akibat dari pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang gagal di beberapa daerah (1926-1927).³⁰ Pemerintah kolonial Belanda melancarkan politik “*Rust en Orde*” (aman dan tertib) yang begitu menekan seluruh gerakan politik di Hindia Belanda.³¹ Politik ini memaksa organisasi-organisasi nasionalis radikal dan para pemimpinnya untuk tidak berpolitik langsung di dalam masyarakat. Tokoh-tokoh radikal seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir dipenjarakan dan diasingkan.

Namun tindakan represif dari pemerintah ini menimbulkan dampak positif bagi gerakan-gerakan non politik dan moderat, termasuk Muhammadiyah yang sempat menyebar ke luar Jawa. K.H. Mas Mansur yang memimpin Muhammadiyah cabang Surabaya berusaha pula mengatasi krisis dengan mengundang segenap anggota dan pengurusnya membahas nasib organisasi di kediamannya. Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 1 Juli 1927 ini kemudian menjadi proses seleksi bagi anggota dan pengurus Muhammadiyah Surabaya. Disebut proses seleksi karena hadirin yang tetap bertahan dalam pertemuan itu

²⁹Partai Islam baru itu bernama Partai Islam Indonesia (PII) yang diketuai oleh R. Wiwoho Purbohadijoyo. Lihat A. K. Pringgodigdo, *op.cit.*, hlm. 131-132.

³⁰Abdul Muluk Nasution, *Pemberontakan Sarikat Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926-1927*, (Jakarta: Mutiara, 1981), hlm. 91.

³¹A. K. Pringgodigdo, *op.cit.*, hlm. 54.

hingga larut malam itu ternyata tinggal 20 orang saja.³² Tindakan penyelamatan yang memanfaatkan momentum tahun baru Hijriyah ini berhasil memulihkan kehidupan organisasi.³³

Keberhasilan ini mengundang perhatian dan simpati K.H. Hisyam, ketua umum Hoofdbestuur Muhammadiyah di Yogyakarta.³⁴ K.H. Hisyam yang dikenal banyak menaruh perhatian di bidang sosial dan pendidikan ini kemudian menetapkan K.H. Mas Mansur sebagai konsul Muhammadiyah daerah Jawa Timur dengan masa tugas selama tiga tahun. Penetapan ini dilakukan berdasarkan *Beslit* yang ditandatangani oleh K.H. Hisyam sendiri tertanggal 17 Maret 1935.³⁵

Pada tanggal 4 Desember 1938, di rumah Dr. Satiman (adik Dr. Sukiman), Solo, dibentuk sebuah partai bernama Partai Islam Indonesia (PII) yang diketuai oleh R. Wiwoho Purbohadijoyo. Dalam partai baru ini K.H. Mas Mansur sendiri duduk sebagai anggotanya.³⁶ Terbentuknya PII dengan dilandasi kesadaran berpolitik di kalangan umat Islam Hindia Belanda untuk melihat perkembangan situasi sosial-politik, baik di dalam maupun di luar negeri. Kehadiran PII ini setidaknya cukup melegakan sebagian umat Islam yang sudah lama mendambakan sebuah partai sendiri yang kooperatif dan inspiratif. Setahun

³²Rosihan Anwar, *Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Kartika Tama, 1971), hlm. 30-31.

³³Mustafa Kemal Pasha dan A. Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, (Yogyakarta: Citra Kasa Mandiri, 2005), hlm. 76.

³⁴Surat Keputusan dan instruksi Hoofdbestuur Muhammadiyah, (Yogyakarta, 1935). Lihat lampiran 7, hlm. 101.

³⁵*Ibid.*

³⁶A. K. Pringgodigdo, *op.cit.*, hlm. 131-132.

setelah berdirinya PII langsung menjadi anggota MIAI dan untuk pertama kalinya mengikuti kongres Al-Islam II pada awal Mei 1939 di Solo.³⁷ Partai ini dengan serta merta berkembang pesat ke seluruh penjuru tanah air ditunjang oleh organnya, majalah Islam Bergerak, yang memperoleh banyak simpati dari dari umat Islam. Perkembangan PII yang sedemikian pesat ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran K.H. Mas Mansur sebagai pucuk pimpinan Muhammadiyah dan enam dari dua belas anggota pengurusnya yang berasal dari Muhammadiyah.

Kesadaran politik K.H. Mas Mansur ini dianggap suatu langkah pembaharuan dalam gerakan yang selama ini *phobia* terhadap apa yang disebut politik itu. Berperannya pimpinan Muhammadiyah di dalam kepengurusan PII menimbulkan pertentangan pendapat dalam gerakan sosial-keagamaan tersebut. Sebagian mengkritik partisipasi aktif K.H. Mas Mansur dan beberapa tokoh lainnya dalam politik yang telah berada di luar garis dan bisa merusak organisasi. Kartosudarmo, Konsul Muhammadiyah Jawa Barat, dan majalah Pancaran Amal Jakarta menilai berpolitiknya K.H. Mas Mansur akan menimbulkan perpecahan di kalangan Muhammadiyah dan membahayakan organisasi. K.H. Mas Mansur berusaha membela diri dari gelombang kritik dan protes dengan menjelaskan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki disiplin atau peraturan yang melarang anggota-anggota atau pemimpinnya untuk bergabung dengan partai atau organisasi politik, dan berperannya orang-orang Muhammadiyah di dalam PII adalah atas nama pilihan pribadi mereka sendiri dan tidak mengatasnamakan organisasi. Selanjutnya dikatakan, adanya partai politik Islam yang kooperatif

³⁷Soebagijo, I.N, *K.H. Mas Mansur: Pembaharu Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 36.

memang diperlukan, guna memberikan pendidikan politik kepada umat yang enggan tahu tentang dunia politik.

Isu ini menarik perhatian para konsul Muhammadiyah untuk mengadakan konferensi di Kudus, 7-9 April 1939. Konferensi memutuskan bahwa tidak seorang pun pimpinan Muhammadiyah bisa ambil bagian aktif sebagai pimpinan di dalam partai atau organisasi politik lainnya selama ia masih melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam Muhammadiyah. Kendati keputusan ini sempat meredakan gelombang kritik terhadap keterlibatan K.H. Mas Mansur dalam politik, gelombang itu muncul lagi dari waktu ke waktu, namun, bagai anjing menggonggong kafilah berlalu, K.H. Mas Mansur terus saja aktif berjuang di bidang politik.³⁸ Bung Karno yang saat itu dalam pengasingannya di Bengkulu juga mendukung sikap K.H. Mas Mansur itu. Di depan konferensi Muhammadiyah se-Sumatera yang dihadiri Mas Mansur selaku Ketua Umum Pengurus Besar Muhammadiyah, 5 April 1941, Bung Karno antara lain berkata:

*Saya mengetahui bahwa kakanda dicerca, dimaki, disangka jahat, malahan ada pula yang mengadakan aksi yang terang-terangan dan underground menghalangi kakanda untuk dipilih kembali sebagai voorzitter H.B. Muhammadiyah. Demikianlah nasib pemimpin, inilah ukurannya. Terusanlah kakanda punya aksi. Sukarno berdiri di belakang kakanda.*³⁹

Enam bulan setelah PII berdiri, K.H. Mas Mansur dan R. Wiwoho mewakili partai tersebut untuk mendirikan Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

³⁸Djarnawi Hadikusumo, *op.cit*, hlm. 58.

³⁹Saleh Said, *K.H. Mas Mansur; Membuka dan Menutup Sejarahnya*, (Surabaya: Budi, [t.t.]), hlm. 20.

bersama kaum pergerakan kebangsaan di Jakarta pada 29 Mei 1939.⁴⁰ Berdirinya GAPI selain dimaksudkan untuk mempersatukan partai politik di Hindia Belanda, juga mempunyai tujuan pokok, yaitu menuntut agar Hindia Belanda berparlemen.⁴¹ PII memberikan dukungan penuh terhadap tuntutan GAPI berdasarkan prinsip musyawarah yang diajarkan Al-Qur'an. PII, dalam kongresnya yang pertama di Yogyakarta pada 11 April 1940, mencetuskan beberapa program yang menyangkut berbagai kepentingan rakyat Hindia Belanda, meliputi masalah-masalah politik, agama, ekonomi, perpajakan, sosial, pengajaran, dan kehakiman. Salah satu program PII yang paling menarik dan relevan dengan apa yang diperjuangkan bangsa pribumi saat itu adalah programnya di bidang politik, yaitu mengadakan sebuah Negara kesatuan Indonesia di bawah suatu pemerintahan pusat yang demokratis,⁴² Dalam kongres ini K.H. Mas Mansur diminta menjadi penasehat pengurus PII yang baru, sedangkan ketua terpilih adalah Dr. Sukiman.

Kemudian pada bulan September 1940, K.H. Mas Mansur mewakili MIAI duduk dalam Dewan Pimpinan Majelis Rakyat Indonesia (MRI) bersama K.H. Wahid Hasyim, Wondoamoseno, Dr. Sukiman, dan Umar Hubeisy. MRI adalah sebuah badan perwakilan rakyat Indonesia yang bertujuan mencapai kesentosaan dan kemuliaan rakyat berdasarkan demokrasi menggantikan peranan Kongres Rakyat Indonesia. Majelis ini dipimpin oleh suatu badan pengurus yang disebut

⁴⁰Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 90.

⁴¹*Ibid.*

⁴²A. K. Pringgodigdo, *op.cit.*, hlm. 132-133.

Dewan Pemimpin yang terdiri dari wakil federasi-federasi besar yang anggotanya sebagian besar menjadi anggota Majelis tersebut, yaitu: GAPI, MIAI, dan PVPN (Persatuan *Vakbonden* Pegawai Negeri).⁴³

Pada tanggal 16 November 1941, Dewan Pimpinan MRI yang beranggotakan 15 orang mengadakan rapat, dalam rapat itu diputuskan bahwa MRI akan memilih pengurus harian yang terdiri dari tiga orang dengan masa tugas hingga kongres MRI yang akan diadakan pada bulan Mei 1942.⁴⁴ Pada acara pemilihan ketua MRI, ternyata suara yang masuk sebagian besar (80%) memilih K.H. Mas Mansur. Terpilihnya K.H. Mas Mansur dianggap sebagai pengakuan atas kepemimpinan K.H. Mas Mansur di kalangan nasionalis. K.H. Mas Mansur sendiri ternyata tidak bersedia mengemban kepercayaan kongres tersebut dengan alasan bahwa ia lebih mencintai Muhammadiyah yang disebutnya sebagai "*mbok tuwo*" itu.⁴⁵ Kongres akhirnya memilih Mr. Sartono sebagai ketua MRI, Sukarjo Wiryopranoto sebagai sekretaris, dan Atik Suardi sebagai bendahara. Majelis ini tidak berusia lama, hanya sekitar tiga bulan, lantaran PSII mengundurkan diri baik dari GAPI maupun dari MRI. Pengunduran diri PSII ini dilakukan atas pertimbangan bahwa dua orang pengurus harian MRI, Sartono dan Sukarjo, telah bertindak di luar garis yang sudah ditetapkan bersama, yakni menerbitkan sebuah

⁴³*Ibid.*, hlm. 149.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 150.

⁴⁵Soebagijo I. N, *op.cit.*, hlm. 14.

surat edaran MRI dan GAPI yang berisi pernyataan setia pada pemerintah untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban.⁴⁶

Ketika Jepang baru seminggu menduduki Hindia Belanda, nama K.H. Mas Mansur muncul sebagai menteri agama dalam daftar susunan kabinet Indonesia yang diajukan Abikusno Cokrosuyoso kepada penguasa pendudukan. Ulah Cokrosuyoso bisa jadi merupakan hanya sekedar candaan karena Cokrosuyoso mengetahui sifat pemerintahan yang fasis, dan memang usulan tersebut nasibnya sama dengan yang diprediksi oleh penggagasnya yakni ditolak mentah-mentah oleh Jepang yang sejak semula tidak berniat membebaskan Hindia Belanda sepenuhnya.⁴⁷

K.H. Mas Mansur sendiri sejak bulan Agustus 1942 telah dipanggil *Gunseikan* (Kepala Pemerintahan Militer) ke Jakarta, pemanggilan ini berkaitan dengan rencana pemerintah militer Jepang untuk menanamkan pengaruhnya di Hindia Belanda. Jepang merencanakan untuk berhubungan lebih dekat lagi kepada para pemimpin masyarakat di Hindia Belanda agar bisa memberikan motivasi kepada rakyat untuk ikut berperan dalam mengerahkan baik dana maupun tenaganya. Oleh karena itulah Kolonel Fujima selaku Panglima Angkatan Darat Jepang di Sumatera menemui Bung Karno yang sedang ditahan di Padang dan merundingkan nasib Hindia Belanda selanjutnya. Demikian pula Bung Hatta, ia dibebaskan Jepang dari tahanan Sukabumi dan ditempatkan di Badan Penasihat

⁴⁶Darul Aqsha, *op.cit.*, hlm. 71.

⁴⁷Soebagijo I. N, *op.cit.*, hlm. 62-63.

Umum Angkatan Darat.⁴⁸ K.H. Mas Mansur pada masa ini juga mendapat bujukan dari Bung Karno untuk ikut membantu merumuskan nasib bangsanya, walaupun awalnya menolak ajakan itu dengan alasan ingin mengundurkan diri dari arena politik dan juga berniat untuk kembali ke Surabaya untuk mengejar dan mengadakan kaderisasi di madrasah dan pesantrennya. Tetapi akhirnya K.H. Mas Mansur menerima ajakan tersebut karena ia merasa bertanggungjawab terhadap keselamatan bangsanya.⁴⁹

Pada masa ini K.H. Mas Mansur terpaksa memenuhi ajakan untuk bekerja sama dengan Jepang yang kemudian menjadi beban mental baginya. Namun yang jelas ialah dengan kesediaan K.H. Mas Mansur keinginan Jepang untuk memanfaatkan pengaruh dan wibawanya yang luas guna memobilisir rakyat Hindia Belanda yang berpenduduk mayoritas Muslim untuk mendukung kepentingan Jepang mencapai kemenangan akhir akan segera terpenuhi.

Pada tanggal 9 Maret 1943 Mas Mansur bersama Bung Karno, Bung Hatta, dan Ki Hadjar Dewantara yang dijuluki empat serangkai menduduki posisi kunci dalam gerakan PUTERA yang diresmikan *Gunseikan* di Lapangan Ikada, Jakarta.⁵⁰ Dalam rapat itu K.H. Mas Mansur turut pula memberikan pidato sambutan, antara lain ia mengatakan bahwa Hindia Belanda dapat bebas dari

⁴⁸Noerhadi Soedarno, *POETERA (Pusat Tenaga Rakyat)*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 7-8.

⁴⁹Saleh Said, *op.cit.*, hlm. 21. K.H. Mas Mansur meghadiri undangan Panglima Balatentara Jepang. Lihat lampiran 8, hlm. 102.

⁵⁰Darul Aqsha, *op.cit.*, hlm. 73.

cengkeraman Belanda adalah berkat Dai Nippon.⁵¹ PUTERA baru mulai berjalan mulai tanggal 16 April 1943, gerakan yang bermarkas besar di Jalan Sunda 18 (kini Jalan Gereja Theresia) memiliki tiga departemen. Ketiga departemen itu adalah: Departemen Perencanaan dan Perhubungan di bawah Bung Hatta, Departemen Kebudayaan di bawah Ki Hajar Dewantara, dan Departemen Kesejahteraan Masyarakat, di bawah K.H. Mas Mansur. PUTERA didirikan Jepang dengan maksud untuk memberikan kepuasan bangsa Indonesia di bidang politik, sekaligus sebagai alat untuk mengeksploitir kekayaan Indonesia bagi keperluan Perang Asia Timur Raya.⁵²

Perhatian dan minat masyarakat terhadap PUTERA untuk mencari berbagai bantuan dan keterangan ternyata di luar dugaan. Markas besar PUTERA yang mulai bekerja dengan kapasitas penuh tanggal 17 April 1942 sampai kewalahan. Semua itu menunjukkan betapa tinggi harapan rakyat pada PUTERA tulis Hatta dalam laporan tiga bulan pertama gerakan itu.

Pada pertengahan tahun 1943 Jepang mulai banyak mengalami kekalahan dalam perang Pasifik. Oleh karena itu Jepang bersikap lunak kepada bangsa-bangsa yang didudukinya. Perdana Menteri Jepang Toyo di depan sidang Parlemen di Tokyo, 16 Juni 1943, menjelaskan bahwa Indonesia akan diberi kesempatan untuk ikut berperan dalam pemerintahan. Sebagai realisasinya, maka pada tanggal 5 September 1943 panglima tertinggi tentara Jepang membentuk *Chou Sangi-in*, yaitu sebuah lembaga semacam Dewan pertimbangan Agung,

⁵¹Noerhadi Soedarno, *op.cit.*, hlm. 15.

⁵²*Ibid.*, hlm. 16.

yang diketuai oleh Bung Karno.⁵³ Lembaga yang bertujuan memajukan usaha pemerintah dan memberi jawaban atas pernyataan panglima tertinggi ini sebenarnya tidak lebih istimewa dari *Volksraad* pada zaman kolonial Belanda.

Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 1944 dibentuklah *Jawa Hokkokai* (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa) yang bertujuan menghimpun segenap kekuatan di Jawa untuk mempercepat kemenangan akhir sesuai dengan amanat Panglima tertinggi Saiko Sikikan.⁵⁴ Terbentuknya *Jawa Hokokai* membuat empat serangkai mengumumkan peleburan PUTERA ke dalam badan baru itu, dan menyatakan berakhirlah sejarah dari organisasi PUTERA. Bung Karno kembali dilantik untuk menjadi ketua pada organisasi ini, sedangkan K.H. Mas Mansur, tertera sebagai salah seorang anggota pengurus umum wakil dari Masyumi.⁵⁵

B. Pemikiran dan Perjuangan Mas Mansur

K.H. Mas Mansur selain aktif dalam berbagai organisasi politik, ia juga aktif dalam masyarakat dan peduli terhadap nasib umat Islam di Nusantara. Ranah perjuangannya kemudian bisa dibagi dalam tiga cakupan, yakni perjuangannya dalam membangkitkan rasa kebangsaan, perubahan sosial keagamaan, serta dalam ranah jurnalistik.

Perjuangan K.H. Mas Mansur dalam membangkitkan kesadaran kebangsaan tampak sejak ia aktif dalam SI, dan kemudian membentuk *Taswirul*

⁵³Darul Aqsha, *op.cit.*, hlm. 76. Lihat juga lampiran 9, hlm. 103.

⁵⁴Soebagijo, *op.cit.*, hlm. 90.

⁵⁵Di Masyumi sendiri K.H. Mas Mansur tercatat sebagai Ketua Muda I. Lihat lampiran 10, hlm. 104.

Afkar dan Madrasah Nahdlatul Wathan. Dalam lembaga yang disebut terakhir, ia berperan banyak dalam menebarkan benih-benih nasionalisme di kalangan kaum muda Islam serta anak didiknya yang kelak akan meneruskan perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan. *Nahdlatul Wathan* yang dalam bahasa Indonesia berarti “Kebangkitan Tanah Air” memberi kesan betapa kuatnya semangat cinta tanah air dan kebangsaan kaum santri itu. K.H. Mas Mansur sewaktu masih sama-sama memimpin madrasah itu bersama K.H. Wahab Hasbullah bahkan sempat juga menggubah sebuah sajak bertema patriotisme dalam bahasa Arab.⁵⁶

Sajak *Nahdlatul Wathan* ini juga kemudian digubah ke dalam sebuah lagu dan merupakan lagu wajib bagi para murid sebelum memulai kegiatan belajarnya. Gubahan ini terus berkumandang di berbagai pelosok dengan berbagai variasi nada menggugah semangat kebangsaan kalangan santri. Hingga tahun 1940-an para santri pesantren Tebu Ireng Jombang, masih sering menyanyikannya sebelum mengawali pelajaran dengan sikap berdiri, seperti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.⁵⁷

Dalam bidang sosial keagamaan, pertemuan K.H. Mas Mansur beberapa kali dengan K.H. Ahmad Dahlan memberikan pengaruh yang besar dalam pemikirannya di bidang keagamaan, K.H. Ahmad Dahlan saat itu memberikan pencerahan dan kesadaran dalam dirinya tentang perlunya suatu metode pendekatan dalam upaya membina suatu masyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Metode yang dianjurkan K.H. Ahmad Dahlan

⁵⁶Untuk melihat sajak ini beserta artinya lihat lampiran 11, hlm. 105-106.

⁵⁷Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (Surabaya: Bisma Satu, 1999), hlm. 8.

adalah melakukan pengkajian dan pengamalan isi Al Quran dengan menggunakan otak dan mata hati hingga tersingkap rahasia alam yang memang diciptakan Tuhan untuk semua makhluknya, termasuk manusia.⁵⁸ “*Kita hidup di dunia, maka dari itu kita harus tahu pula akan apa-apa yang terjadi di sekeliling tempat kita hidup itu*”, kata K.H. Ahmad Dahlan.⁵⁹ Pengaruh dari pemikiran K.H. Ahmad Dahlan ini yang kemudian semakin mempertebal keyakinan dan semangatnya dalam memurnikan ajaran Islam dan memajukan bangsa-bangsanya dengan melakukan perubahan di bidang sosial keagamaan.

K.H. Mas Mansur juga tertarik dalam bidang jurnalistik yang dimanfaatkannya sebagai alat untuk menyebarluaskan berbagai gagasan dan pemikirannya kepada masyarakat di dalam upaya mewujudkan cita-citanya. Media komunikasi pertama yang diterbitkan K.H. Mas Mansur adalah *Le Jinem*, pada tahun 1920 di Surabaya. Kemudian ia menerbitkan *Suara Santri* (1921)⁶⁰, serta *Jurnal Etude dan prietair*, semua majalah itu membawakan suara kaum santri Surabaya.

Le Jinem maupun *Suara Santri* dijadikan K.H. Mas Mansur sebagai tempat untuk menumpahkan segenap isi hati dan cita-citanya berkenaan dengan perbaikan nasib umat dan bangsa. Bahasanya yang singkat padat dan mudah dipahami membuat ia mempunyai reputasi yang tinggi dalam bidang jurnalistik. Ia sempat menjadi redaktur dalam majalah *Kawan Kita Yang Tulus* di Surabaya, ia

⁵⁸Rosihan Anwar, *op.cit.*, hlm. 27-28.

⁵⁹Amir Hamzah Wirjosukarto, *op.cit.*, hlm. 142.

⁶⁰Saleh Said, *op.cit.*, hlm. 38.

juga sempat menjadi pemimpin umum Suara Muslimin Indonesia saat Masyumi terbentuk pada akhir 1943.⁶¹

K.H. Mas Mansur selain menerbitkan dan memimpin media sendiri, ia aktif pula menulis di berbagai media lain, seperti Hindia Timur, dan menjadi penyumbang tulisan untuk majalah-majalah siaran dan Kentongan (Surabaya), Penganjur dan Islam Bergerak (Yogyakarta), Panji Islam dan Pedoman Masyarakat (Medan), Adil (Surakarta), dan Suara MIAI (Jakarta).⁶²

⁶¹Untuk melihat tulisan-tulisan karya K.H. Mas Mansur, lihat lampiran 12, 13, dan 14, hlm. 107-117.

⁶²Saleh Said, *op.cit.*, hlm. 30.